

APSSI



Kecerdasan Sosial Mengelola Konflik

Seri Konflik Industrial, Politik dan Demokratisasi

Prolog

DR. (HC) Sri Sultan Hamengku Buwono X

Prosiding

*Konferensi Nasional Sosiologi 1
Palembang, April 2013*



**ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

KECERDASAN SOSIAL MENGELOLA KONFLIK: SERI
KONFLIK INDUSTRIAL, POLITIK DAN
DEMOKRATISASI

Palangkaraya : Unswi Press 2013
Jumlah halaman : 100
Jumlah gambar : 10
Jumlah tabel : 10

Direktori
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jl. Sekeloa Utara No. 10
Palangkaraya 71122
Telp. 0511-8250777, Fax 0511-8250778
Email: unswi@unswi.ac.id

**KECERDASAN SOSIAL MENGELOLA KONFLIK :
SERI KONFLIK INDUSTRIAL, POLITIK DAN
DEMOKRATISASI**

Hak Cipta © 2013 oleh Unswi Press
Hak Penerbitan © 2013 oleh Unswi Press

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperjual-
belikan atau menyewakan isi buku ini dalam bentuk apapun baik secara
elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam,
atau dengan menggunakan cara-cara lain yang sejenis tanpa izin penerbit.

ISBN : 978-602-7171-2-2



**KECERDASAN SOSIAL MENGELOLA KONFLIK : SERI
KONFLIK INDUSTRIAL, POLITIK DAN
DEMOKRATISASI**

Palembang : Unsri Press 2013

Setting & Lay Out Isi : Maryati, A.Md

Cetakan Pertama Mei 2013

xxviii +264 halaman : 24 x 16 cm

Diterbitkan Oleh :

Penerbit Universitas Sriwijaya Palembang

Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139

Telpon 0711- 360969-373422, Fax. 0711- 360969

Email : unsri.press@yahoo.com

Website : www.unsripress.unsri.ac.id

Hak Cipta @ 2013 pada Penulis/Penyusun
Hak Penerbitan Pada Unsri Press

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN : 979-587-479-9

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Konferensi Nasional Sosiologi pertama dengan tema Kecerdasan Sosial Dalam Mengelola Konflik, telah sukses dilaksanakan di Kota Palembang pada tanggal 23-25 April 2013. Penyelenggaraan konferensi yang dihadiri lebih 90 orang dari lura Kota Palembang merupakan wujud program kerjasama Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) dan Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Konferensi ini menghadirkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai pembicara Kunci dan 3 orang pemakalah utama pada sesi Pleno, masing-masing Dr. Muhammad Najib Azca mewakili akademisi (Sosiologi UGM), Dr. Imam Prasajo mewakili Aktifis (Nurani Dunia) dan Drs. Marjono, MM mewakili Praktisi (BNP2TKI).

Panitia konferensi nasional sosiologi perdana ini telah menerima 50 makalah yang terdiri dari 6 klaster, yaitu: 1) Konflik Sumber Daya Alam 13 makalah; 2) Konflik Komunal 11 makalah; 3) Konflik politik dan demokratisasi 5; 4) Konflik Industrial 8 makalah; 5) Konflik Gender 6 makalah dan 6) Konflik dan kekerasan kaum muda 7 makalah. Keenam klaster ini kemudian di kelompokkan menjadi 4 buku prosiding. Buku Pertama, Konflik Kekerasan Kaum Muda dan Konflik Gender; Buku kedua Konflik Industrial dan Konflik Politik-Demokratisasi; Buku ketiga, Konflik Komunal dan Buku Keempat Konflik Sumber Daya Alama (SDA).

Adapun tujuan dari Konferensi Nasional Sosiologi I adalah:

- a. Memetakan berbagai jenis konflik, skala lokal, national dan internasional
- b. Merumuskan resolusi konflik dan manajemen konflik untuk penyelesaian konflik tersebut.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara cerdas, elegan, dan berkeadaban.

Konflik memang merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat manapun. Apalagi bagi masyarakat multietnis seperti Indonesia. Keragaman dan keunikan kultur membuat bangsa ini menjadi kaya secara sosial budaya. Namun demikian, kekayaan itu bisa menimbulkan potensi konflik yang luar biasa, lantaran perbedaan sudut pandang dalam memaknai sesuatu dan mungkin saja hal tersebut berujung pada

persengketaan. Terlebih, jika perbedaan itu justru dibingkai oleh stigma superioritas-imperioritas. Bahkan dalam masyarakat yang amat homogen sekalipun, selalu saja ada potensi konflik. Perbedaan kepentingan, orientasi, selera, keinginan, pandangan dan lainnya dapat memicu konflik yang mungkin pada mulanya berskala kecil, tetapi kalau masyarakat tersebut tidak cerdas menyikapi dan mengelolanya hal tersebut akan menjadi petaka kemanusiaan.

Benturan itu lumrah terjadi, mengingat karakter manusia dan setiap masyarakat diciptakan dengan banyak perbedaan. Setiap individu dan masyarakat memiliki sejarah dan karakternya yang unik. Selain itu, dalam diri setiap individu memiliki nilai-nilai yang memandu perilaku dan pikirannya, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat peluang untuk terjadi suatu konflik sosial sangatlah besar. Dengan kata lain, konflik juga bisa dipahami sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik juga bisa timbul sebagai akibat ketidakseimbangan hubungan (kesenjangan sosial, perbedaan status sosial, akses sumber daya, dan kekuasaan).

Dalam konteks Indonesia, konflik seringkali berujung pada kekerasan, baik di tataran tindakan, perkataan, sikap, bahkan dalam wujud struktur dan sistem yang memungkinkan kekerasan itu terlegitimasi. Dapat disaksikan betapa kekerasan itu senantiasa menghiasi lembaran sejarah bangsa ini. Mulai dari konflik Aceh, Papua, Sampit, Poso, bahkan sampai pada konflik di Balinuraga Lampung Selatan, yang kesemuanya menyebabkan kematian secara masal. Jelas, konflik tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial, konstruksi nilai-nilai, bahkan pemaknaan terhadap kelompok lain. Berkenaan dengan hal ini, menarik untuk mengingat sebuah ungkapan, bahwa kekerasan merupakan buntut dari ketidakpuasan yang menumpuk.

Namun demikian, hal itu bukan berarti bahwa konflik harus terus dibiarkan mencari jalannya sendiri. Kita sebagai anggota masyarakat yang beradab tetap berkewajiban untuk mencari solusi terhadap konflik tersebut, apapun bentuk dan latarnya. Konflik hadir tidak sebagai tontonan, tetapi sebagai ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk membangun kecerdasannya, untuk mengkomunikasikan kepentingannya, untuk menegosiasikan kebutuhannya, bahkan untuk mengekspresikan jati dirinya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, apapun jenis kelaminnya, apapun agamanya, apapun pekerjaannya.

Akhir-akhir ini eskalasi konflik dalam masyarakat intensitasnya semakin tinggi, petanya semakin meluas, dan ketampakannya semakin nyata. Sebut saja beberapa diantaranya, yaitu kasus Sampang (konflik agama-komunal), Sumbawa (etnis-agama), Mesuji (lahan-ekonomi), Lampung (etnis ekonomi), dan Makassar (politik identitas). Tentu tidak mudah untuk mengidentifikasi sejumlah konflik tersebut. Beberapa diantaranya merupakan akumulasi dari sejumlah persoalan, namun tidak sedikit diantaranya yang hanya dipicu oleh persoalan sederhana kalau tidak dapat dikatakan sepele.

Yang menjadi problem sebenarnya, tidak terletak pada konflik itu sendiri, tetapi pada kemampuan kita untuk mengelolanya agar konflik tersebut tidak meluas, dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik justru diharapkan menjadi sarana meningkatnya kecerdasan sosial dan kecakapan bermasyarakat (*sociability*). Pada sisi lain, ada banyak konflik yang berakhir bukan karena adanya penyelesaian yang adil, melainkan lantaran adanya satu pihak yang mengalah demi menghindari korban yang lebih besar. Di sini, penting terbangunnya sistem sosial yang memungkinkan keadilan distributif sumber daya terlembagakan, agar penyelesaian konflik tersebut tidak bersifat semu melainkan telah bercorak substansial.

Dalam konteks itulah kita sangat membutuhkan apa disebut sebagai kecerdasan sosial mengelola konflik, justru karena semakin tingginya tingkat kompetisi antar kelompok dan anggota masyarakat dalam memperebutkan ruang kehidupan, terutama di ranah ekonomi dan ranah politik. Dua ranah tersebut adalah yang paling besar kontribusinya terhadap berbagai tipe dan dinamika konflik di dalam masyarakat Indonesia. Sekalipun dalam petampakan seringkali dua tipe konflik tersebut dipahami sebagai konflik agama atau pemeluk agama, namun dibalik dari itu ternyata adalah konflik politik dan atau ekonomi.

Oleh karena itu, konferensi yang bertemakan kecerdasan sosial mengelola konflik merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan tumbuh, mengeskalasi, dan meluasnya konflik itu sendiri. Kecakapan bermasyarakat (*sociability*) dalam mengelola konflik itu memang perlu dibangun. Agar, penyelesaian konflik tidak bersifat semu dan sementara, tetapi berwatak substantif dan berkeadilan. Sebagai contoh, kita amat membutuhkan lembaga arbitrase, rekonsiliasi, atau apapun namanya yang memiliki komitmen dan integritas tinggi serta berketeguhan hati untuk selalu membangun komunikasi sosial dalam menyelesaikan konflik secara cerdas, elegan, dan berkeadaban. Maka bila kita telah memiliki

kecerdasan sosial tersebut, segala bentuk perbedaan, persaingan, dan intrik tidak selalu berujung pada konflik kekerasan. Justru, hal tersebut dapat ditransformasikan sebagai pendorong sekaligus ruang untuk memperkuat kecakapan bermasyarakat, beragama dan bernegara.

Demikian pengantar buku prosiding dari panitia, diharapkan ke depan Konferensi Nasional Asosiasi Program Studi Sosiologi akan semakin baik. Kepada semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan konferensi ini diucapkan terima kasih, baik kepada Sri Sultan Hamengkubowono X sebagai pembicara utama, Gubernur Sumatera Selatan Ir. H. Alex Noerdin sebagai pembuka acara konferensi, Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Badia perizade, MBA dan Ketua Umum APSSI Dr. Muhammad Najib Azca sebagai pembawa sambutan, serta kepada semua peserta dan panitia diucapkan terima kasih. Semoga sumbangsihnya mulai persiapan sampai pelaksanaan konferensi diterima sebagai pahala disisi Allah SWT. Amien.

Palembang, 8 Mei 2013

Panitia Konferensi Nasional SosioIogi I

DR. M. Ridhah Taqwa

Ketua Umum

Kata Sambutan

Konferensi Nasional Sosiologi I yang diselenggarakan oleh Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) bekerjasama dengan Magister Sosiologi Universitas Sriwijaya di Palembang pada tanggal 23-25 April 2013 akan menjadi momen yang terus dikenang dalam perjalanan sosiologi di Indonesia karena, sekurangnya, dua alasan. Pertama, karena ini adalah ayunan langkah pertama yang dilakukan oleh APSSI dalam menyelenggarakan perhelatan akademik sosiologi di bumi Nusantara yang diikuti oleh para peserta dari berbagai penjuru di tanah air. Sampai kapanpun rangkaian acara Konferensi APSSI akan berjalan, acara perdana ini tak akan terhapus dari catatan sejarah. Kedua, karena pilihan temanya yang sangat relevan dengan tantangan dan problema social kontemporer di Indonesia di era yang lazim disebut sebagai “zaman reformasi”, yaitu: bertema “Kecerdasan Sosial dalam Mengelola Konflik”. Meski jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kekerasan pada fase awal “zaman reformasi,” hingga kini bumi khatulistiwa ini masih juga dirundung berbagai tragedy kekerasan yang terkadang bisa mengancam nasib reformasi itu sendiri, terutama ketika Negara justru absen ketika gejolak dan amuk massa terjadi di sejumlah sudut negeri ini.

Selain dua alasan empirik tersebut, pilihan tema konflik dan kekerasan tersebut juga seiring dengan perkembangan teoritik di ranah sosiologi global. Saya teringat dengan tulisan guru besar sosiologi di Universitas Lancaster Inggris, Sylvia Walby, berjudul “Violence and society: an emerging field of sociology” yang dimuat dalam *Current Sociology* (2013, 61: 95). Dalam tulisan yang merupakan pendahuluan dalam sebuah monografi yang diterbitkan dari kumpulan artikel yang dipresentasikan dalam *plenary session* bertopik kekerasan yang diselenggarakan dalam konferensi International Sociological Association (ISA) di Gottenborg pada tahun 2010, Profesor Walby beragumen bahwa kekerasan dan masyarakat merupakan sebuah ranah yang sedang berkembang dalam disiplin sosiologi dewasa ini.

Meski kadang dipinggirkan dalam kajian-kajian sosiologi, kekerasan acap muncul dalam analisis ihwal kehidupan keseharian maupun dalam momen-momen besar perubahan social. Menurutnya, cara-cara baru kemunculan kekerasan telah menggoyahkan gagasan-

gagasan lama tentang watak dan arah kekerasan; menentang asumsi-asumsi bahwa mereka yang papa lebih cenderung melakukan kekerasan dibandingkan mereka yang berkuasa dan bahwa modernitas semakin kurang mengandalkan kekerasan (*less violent*). Menurut *Chair* dalam studi gender UNESCO tersebut, riset-riset mutakhir mengenai kekerasan terhadap perempuan dan kelompok-kelompok minoritas di bagian dunia sebelah Selatan memberi alasan kuat untuk memasukkan kekerasan sebagai sebuah isu pokok dalam sosiologi.

Mengikuti presentasi berbagai paper bertopik konflik dan kekerasan yang disajikan dalam konferensi tersebut, saya merasa senang dan optimistis bahwa studi konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh kolega sosiolog dari berbagai universitas di Indonesia akan berkembang pesat dengan pengkayaan empirik maupun teoritik yang bermakna. Hal ini terutama karena melihat antusiasme dan energy segar yang dikerahkan oleh para sosiolog tersebut untuk mengkaji fenomena kompleks dan menarik di berbagai penjuru di tanah air. Misalnya dari “Konflik Nelayan dan Sumber Daya Laut di Teluk Palu Kota Palu Sulawesi Tengah” oleh Dr. Haslinda B. Andriani, M.Si (Prodi Sosiologi Universitas Tadulako Palu) hingga “Pemetaan Konflik yang Terjadi Akibat Eksploitasi Batubara di Propinsi Bengkulu” oleh Lesti Heriyanti (Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu); dari “Konflik Keagamaan di Madura: Studi terhadap Kasus Konflik Syi’ah-Sunni di Sampang Madura” oleh Iskandar Dzulkarnain (Sosiologi Universitas Trunojoyo) sampai “Konflik Etnik di Kalimantan Dalam Format Keresasian Sosial” oleh Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S (Universitas Mulawarman Samarinda); dari “Anatomi Tawuran Antar Kelompok Pemuda di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat” oleh Daisy Indira Jasmine (Departemen Sosiologi FISIP UI) hingga “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kelurahan Oesapa Kota Kupang” oleh Balkis Soraya Tanof (Sosiologi FISIP UNDANA Kupang – NTT); dari “Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo” oleh Dr. Anis Farida (Universitas Wijaya Kesuma, Surabaya) sampai “Belajar Dari Konflik dan Damai Aceh” oleh Dr. M Nazaruddin (Prodi Sosiologi Fisip Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh). Itu sekadar ilustrasi betapa kayanya kasus konflik yang dibedah dan didiskusikan dalam Konferensi Nasional Sosiologi 1 APSSI di Palembang lalu.

Saya sendiri ‘terjerumus’ dalam studi konflik melalui keterlibatan saya sebagai peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak 1996. Itu merupakan periode

ketika kekerasan social mulai marak terjadi, sebuah simtom yang kelak difahami sebagai pertanda menjelang terjadi perubahan rezim dan transisi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi. Keterlibatan saya dalam studi konflik dan kekerasan semakin intensif ketika saya mulai menempuh program studi master di Australian National University (ANU) pada tahun 2001-2003 dan menulis tesis mengenai peranan aparat keamanan dalam konflik komunal-agama di Ambon, Maluku. Pada saat yang sama PSKP UGM tergabung dalam jejaring studi konflik di Asia Tenggara bernama South East Asia Conflict Studies Network (SEA-CSN) yang berpusat di Penang, Malaysia. Saat ini bersama kolega dosen di Jurusan Sosiologi UGM saya mengampu mata kuliah bertajuk *Conflict, Peace and Development* yang tergabung dalam Global Peace Campus Program (GCP) yang diinisiasi oleh Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) dan melibatkan sejumlah universitas di Kamboja, Srilanka dan India (termasuk di wilayah konflik Kashmir). Ringkasnya, saya membayangkan dan yakin bahwa studi konflik dan kekerasan (juga studi perdamaian, jika kita melihatnya dari penjuru yang lain) akan berkembang pesat sebagai salah satu cabang kajian maupun dalam pengajaran dalam disiplin sosiologi di Indonesia dan akan menyumbangkan bagi pengembangan studi dengan focus serupa di ranah regional maupun global.

Apalagi Indonesia memang merupakan salah satu ‘laboratorium’ studi konflik, kekerasan dan perdamaian yang menyediakan ladang pengkajian yang kaya, berdimensi luas dan amat bervariasi. Dengan rentang geografis yang lebar, dengan tingkat keragaman suku, bangsa dan bahasa yang luar biasa, serta dengan penerapan desentralisasi system politik pada periode pasca “orde baru”, Indonesia menyajikan beraneka kasus konflik, peristiwa kekerasan maupun ikhtiar membangun dan melestarikan perdamaian. Kebetulan ada program pembuatan data base konflik kekerasan di Indonesia bernama Violent Conflict in Indonesia Study (ViCIS), yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui koran local di berbagai daerah di Indonesia dalam periode 1998-2008.¹ Mengklaim sebagai salah satu data set mengenai konflik kekerasan terbesar di dunia, ViCIS mengumpulkan semua data insiden kekerasan

¹ Data ViCIS dikelola menjadi proyek Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan (Kemeko Kesra) dengan dukungan Bank Dunia dan The Habibie Center dan sebagian datanya bisa diakses melalui laman www.snpk-indonesia.com. Data mentah dalam bentuk rekaman citra (foto) dari setiap halaman dari koran lokal tersebut tersedia dan direncanakan bisa diakses oleh public melalui sejumlah fasilitas yang disediakan di lembaga pemerintah dan universitas.

konflik (baik kekerasan maupun nir-kekerasan) maupun kekerasan kriminal yang dilaporkan di berbagai koran lokal di 22 provinsi di Indonesia. Meskipun penggunaan koran sebagai sumber data mengenai konflik kekerasan memiliki sejumlah kelemahan, namun dengan ketaktersediaan berbagai sumber lain yang *reliable* membuat data se ViCIS sangat berguna bagi riset-riset konflik kekerasan di Indonesia. Mengingat problem yang acap terjadi di Indonesia adalah lemahnya pemanfaatan sumber-sumber data yang tersedia (*under utilization*), maka pemanfaatan data-data tersebut untuk studi-studi konflik dan kekerasan merupakan salah satu agenda penting bagi pengembangan studi konflik kekerasan dan perdamaian di Indonesia. APSSI bisa berperan dalam melaksanakan pelatihan mengenai metode riset dalam penggunaan data-data sekunder mengenai konflik kekerasan tersebut untuk studi-studi mengenai konflik, kekerasan dan perdamaian di Indonesia.

Terakhir, mewakili segenap pengurus APSSI saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta Konferensi Nasional Sosiologi I APSSI di Palembang, baik kepada para pemakalah, moderator maupun peserta aktif, yang telah membuat perhelatan tersebut menjadi sebuah acara ilmiah yang berkualitas dan bereputasi tinggi. Tak kalah pentingnya, kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Panitia Penyelenggara Konferensi Nasional APSSI, dalam hal ini program Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Sriwijaya, Palembang, khususnya Dr. M. Ridhah Taqwa dan tim, yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan tersebut sehingga bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

Akhirul kalam, semoga Konferensi Nasional Sosiologi I APSSI di Palembang pada 23-25 April 2013 menjadi salah satu sumbangan dari penggiat program studi sosiologi di Indonesia bagi transformasi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih damai, bermartabat dan berkeadilan.

Salam Hormat,
Ketua Umum APSSI

Dr. Muhammad Najib Azca, MA

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Kata Sambutan	ix
Daftar Isi	xiii
Keynote Speech : DR. (HC). Sri Sultan Hamengku Buwono X Kecerdasan Sosial Dalam Mengelola Konflik	xv
A. KONFLIK INDUSTRIAL	
1. Konflik Komunitas dan Koporat di Wilayah Operasi Industry Energi: Pelajaran dari kasus perusahaan energi di wilayah di Jawa Barat (Indonesia) dan di wilayah Delta (Nigeria) <i>Sulastri, Departemen Sosiologi UI</i>	1
2. Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo <i>Dr. Anis Farida, Universitas Wijaya Kesuma</i>	19
3. Konflik Hubungan Industrial: Suatu Kajian Pasar Kerja Fleksibel di Perguruan Tinggi <i>Vieronica Varbi Sununianti, FISIP UNSRI</i>	29
4. Dinamika Konflik dan Perlawanan Petani Rengas Versus PTPN VII Cinta Manis <i>Abdel Kholik, (LSM)</i>	65
5. 'Cultural Conflict' Masyarakat Agraris dalam Industri Pabrik Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan <i>Dr. Syamsu A. Kamaruddin, M.Si, FKIP Universitas Veteran RI Makassar</i>	87
6. Perspektif Laten dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis PNPM <i>Muhammad Hayat, Jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang</i>	101
7. Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Sengketa Tanah Pertanian di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir	115

Ir. M. Yazid, M.Sc., Ph.D, Chi-chi Novitasari & Ir. Julian Junaidi, M.Si, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

8. Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu 127
Drs. H. Basri, M.Si & Drs. H. Nurhamlin, MS, Dosen Sosiologi, FISIPOL Universitas Riau

B. KONFLIK POLITIK & DEMOKRATISASI

9. Konflik Politik: Natur Masyarakat dan Kekuasaan 145
Novri Susan, Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya
10. Belajar Dari Konflik dan Damai Aceh 159
Dr. M Nazaruddin, Prodi Sosiologi Fisip Unimal Lhokseumawe
11. Pro-Kontra Kebijakan Relokasi Korban Erupsi Merapi Studi Kasus: Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman DIY dan Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah 167
Suryo Adi Pramono Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta
12. Model Analisis Konflik Politik lokal - Pemilu Kada: Suatu Perspektif Teoritis 223
Dr. M. Ridhah Taqwa, S2 Sosiologi Fisip Unsri
13. Resolusi Konflik Pilkades Melalui Pendekatan Kultural (Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga) 235
Sulyana Dadan, S.Sos., M.A & Dra. Sotyana Wardhiana, M.Kes, Jurusan Sosiologi FISIP INSOED Purwokerto
14. Maraknya Konflik Sosial Antar Warga (Desa) dan Upaya Penanganannya 249
Roslinawaty, Program Studi Sosiologi Universitas Tadulako

KEYNOTE SPEECH KECERDASAN SOSIAL DALAM MENGELOLA KONFLIK

DR.(HC) Sri Sultan Hamengku Buwono X

JIKA membaca sejarah tentang perbedaan atau kebhinnekaan kita sebagai bangsa, sejak dulu kala sudah ditulis oleh Mpu Tantular dalam Kitab *Sotasoma: "Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa"* —biarpun berbeda-beda, sejatinya kita itu satu, tiada kewajiban mendua— karena dengan penghormatan akan perbedaan itulah Dialog Budaya bisa dikembangkan untuk resolusi konflik.

Warisan Sejarah

Tetapi di zaman yang sarna, jika membaca lembar karya Mpu Prapaia, Kitab *Negarakertagama*, bagi yang melawan perintah Majapahit, "...didatangi pasukan ekspedisi jaladi mantry yang tak terbilang jumlah dan mashur namanya untuk ditiadakan sama sekali...". Tindakan yang diambil, dalam bahasa Jawa kuna "*wicirna-sahana*" - dikirim ke lembah ke-tiada-an— *sima*, musnah, tak berbekas dari perut bumi¹. Di masa Orde Baru, "*warisan*" Majapahit itu dijalankan dengan teliti ketika memadamkan pemberontakan di daerah.

Memang, secara kesejarahan kita bukanlah bangsa yang "bebas dari konflik sosial" (*social-conflict free*). Jatuh bangun dan perluasan kekuasaan pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu (Majapahit) dan Islam (Mataram) sangat kental dengan potensi konflik sosial, bahkan menjadi *mode of struggle*. Hingga detik ini pun, konflik sosial, terus terjadi secara berulang dan terus-menerus mereplikasi-dirinya dari satu tempat ke lain tempat dengan bentuk beraneka-rupa di seluruh penjuru Indonesia. Konflik sosial, kini telah menjadi bagian dari "rutinitas dan keseharian" masyarakat. Intensitas dan persebaran konflik sosial menguat sejalan dengan multiplikasi konflik yang dihembuskan melalui berita-berita tentang konflik di media massa, terutama melalui media TV.

Pemberitaannya menjadi “proses sosialisasi”, tanpa disadari membentuk opini tentang perbedaan kepada warga di lain tempat untuk meniru dan mengimitasi “jalan kekerasan” terhadap persoalan serupa yang terjadi di lokalitas masing-masing. Melihat proses-proses konflik sosial yang demikian tertanam dalam sejarah, dan terus “disegarkan” dalam ingatan tiap warga melalui media informasi, sesungguhnya konflik sosial di Indonesia bukanlah “barang baru dan aneh”. Ia hanya berubah bentuk dan semangat.

Kecenderungan konflik sosial di Maluku, Poso, Kalimantan Barat, dan Papua pun mengikuti pola konflik sosial yang terjadi di Indonesia, baik dalam bentuk, latar belakang atau akar-masalah, kedalaman, dan skala konflik. Konflik memang sesuatu yang nyaris tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan. Selama masyarakat masih memiliki kepentingan, kehendak, serta cita-cita, konflik senantiasa “mengikuti mereka”.

Konflik yang mencuat dalam berbagai kejadian yang memprihatinkan dewasa ini bukanlah konflik yang muncul begitu saja. Akan tetapi, merupakan akumulasi dari ketimpangan-ketimpangan dalam menempatkan hak dan kewajiban yang cenderung tidak terpenuhi dengan baik. Konflik merupakan gesekan yang terjadi antara dua kubu atau lebih yang disebabkan oleh adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, kelangkaan sumberdaya, serta keadilan distributif tidak merata, yang menimbulkan deprivasi relatif, kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan kenyataan yang didapat.

Membalik Paradigma Konflik

Istilah konflik itu sendiri dikonotasikan negatif, diartikan sebagai lawan kata dari keserasian, kedamaian, dan keteraturan. Konflik lalu diasosiasikan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau disembunyikan, tetapi harus diakui keberadaannya. Oleh karena itu, harus dikelola dan diubah menjadi kekuatan untuk perubahan positif masyarakat ke arah perdamaian yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pemikiran filosofis dalam merumuskan bentuk baru konflik yang *chaotic* menjadi sebuah peluang kemajuan ketimbang potensi kehancuran.

Bila konflik dipandang sebagai *negative chaos*, maka konflik tidak akan menjadi dialektika kultural, peningkatan etos kerja, daya kreativitas dan produktivitas masyarakat menuju kemajuan.

Berkembangnya persepsi *negative chaos* oleh sebab pluralitas ditempatkan *by design* sebagai pluralitas semu, warisan Orde Baru. Sementara pada tingkat fondasi struktural terjadi penyeragaman besar-besaran dalam mentalitas, gaya dan sikap hidup. Setiap persoalan selalu dilihat dari pendekatan keamanan, stabilitas, keberaturan, keseragaman, dan kesatuan. Keanekaragaman dipaksakan menjadi keseragaman, dinamisitas menjadi stabilitas, heterogenitas menjadi homogenitas. Yang ditumbuhkan adalah berbagai bentuk 'ketakutan', ketakutan berbeda, dan ketakutan akan ketidakberaturan. Seharusnya dunia dilihat seperti tumbuhan merambat (*rhizome*) yang tumbuh *chaotic* dengan beberapa prinsip dasar³.

Pertama, prinsip hubungan (*connection*). Rumpun tidak henti-hentinya menghubungkan dirinya dengan akar rumput lain dengan pola *chaotic*. Tidak seperti pohon beringin, yang terpancang pada sebuah titik, dengan segala keterpusatan dan ketunggalannya yang bersifat sentralistik, hierarkis, dan birokratis. *Kedua*, prinsip dialogis. Unsur-unsur daerah, suku dan agama yang plural harus selalu menghubungkan dirinya secara dialogis dengan pihak lain, sehingga terjadi "pengkayaan" pengetahuan, makna, dan nilai-nilai kultural.

Ketiga, prinsip keanekaragaman. Setiap unsur negara kesatuan harus menyesuaikan diri dengan sifat alamiahnya, tatkala meningkatkan hubungan dengan pihak lain. *Keempat*, prinsip de-teritorialisasi. Setiap unsur negara kesatuan dibentuk oleh teritorial-teritorial, yang di dalamnya makna-makna kebudayaan terbentuk. Agar dapat bertumbuh, setiap unsur harus memperluas 'teritorial' -nya, memperluas wawasan, meningkatkan informasi, merajut jaringan ekonomi, menumbuhkan jiwa pionir, dan mengantisipasi perubahan. *Kelima*, prinsip peta (*cartography*). Unsur-unsur negara kesatuan harus dilihat seperti sebuah 'peta yang dinamis', yang bersifat terbuka, berubah, dan modifikatif. Setiap unsumya harus mau mengubah diri, agar bisa mengubah peta tersebut.

Chaos yang menandai konflik hanya dapat menjadi peluang masa depan bila kita mengubah pandangan dunia (world view), dengan membalik paradigma dari negative chaos ke positive chaos. Inilah sebuah dinamika dalam cara merajut guna memperkuat dan memperluas kerja-kerja jaringan menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Primordialisme Pemicu Konflik

Jangan sampai manajemen politik berubah menjadi

manajemen bisnis politik konflik untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar bagi kepentingan kelompok politik tertentu. Keterbukaan dan keseriusan dalam mengurai akar masalah konflik ditunjang komunikasi yang baik antarpihak adalah cara penanganan konflik yang perlu dikedepankan. Informasi yang jujur yang dipahami oleh semua pihak merupakan syarat terjalannya komunikasi tersebut.

Keragaman budaya bisa juga berarti keragaman nilai-nilai, yang seharusnya dipandang sebagai modal bangsa, bukan sebagai sumber konflik. Komunikasi dalam wujud persentuhan dan interaksi lintas budaya yang apresiatif dan komunikatif, seharusnya diusahakan agar melahirkan sintesa-sintesa budaya yang lebih bermutu, bukannya konflik.

Konflik identitas cenderung lebih rumit, bertahan lama dan sulit dikelola, apalagi jika berkelindan dengan konflik primordial, akan lebih sulit lagi solusinya karena sangat emosional. Tidak ada resep mujarab yang langsung menyembuhkan, karena muncul interaksi rumit antarkekuatan yang berkonflik. Sehingga, pola solusi konflik di satu daerah tak bisa diterapkan di daerah lain.

Dalam interaksi antaretnis harus tetap diupayakan pemahaman pentingnya unsur primordial etnis. Unsur-unsur penting primordial itu adalah faktor keturunan dan ikatan kekerabatan, sistem keagamaan, tradisi, dan bahasa. Dalam realitas kehidupan, unsur-unsur primordial menjadi pengikat utama dalam membentuk suatu identitas kelompok etnis. Identitas ini menjadi penanda ciri atau karakter khas yang terwujud dalam sikap dan perilaku budaya etnis.

Dalam sistem interaksi sosial, perilaku budaya merupakan perilaku simbolik yang pemaknaannya harus dilakukan kontekstual. Artinya, setiap orang dari suatu kelompok masyarakat harus mampu mengidentifikasi dan memahami makna simbolik dari perilaku budaya kelompok yang lain. Pemahaman yang sarna terhadap suatu perilaku simbolik di antara kelompok-kelompok yang berbeda, penting untuk mengantisipasi kesalahpahaman dalam interaksi sosial. Dengan persepsi ini, pemahaman yang sarna dapat meminimalisasi timbulnya konflik yang bernuansa etnis.

Setiap orang atau kelompok masyarakat harus menghindari perilaku yang menyinggung faktor primordialisme etnis yang lain, karena berpotensi memicu ketegangan sosial yang bisa menyebar menjadi konflik massal.

Manajemen Konflik Berbasis Kearifan Lokal

Pendekatan budaya kiranya dapat dijalankan di sini dengan upaya-upaya akulturasi budaya antaretnis. Pada pokoknya, banyak cara yang bisa dijadikan media saling menyapa dan saling mengenal antara satu etnis dengan etnis lainnya, jika kita memiliki komitmen kebangsaan. Proses dialog antaretnis itu harus ditujukan agar seluruh kekayaan budaya-budaya etnis terjalin dalam “**serat-serat kebudayaan Nusantara**”, sebuah pluralitas yang saling menguatkan, seperti anyaman benang-benang pada tenunan.

Proses itu membentuk batang tubuh Kebudayaan Indonesia Barn yang kokoh, laksana sebatang pohon kelapa yang berdiri tegak oleh serat-serat kayu, akar memikul batang, di mana batang menunjang daun dan buah.

Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Dan setiap budaya memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) dalam menyikapi penyelesaian konflik. Dimana penentuan langkahnya perlu dicermati dan dianalisis, tidak saja berdasarkan teori-teori konflik universal, tetapi juga menggunakan paradigma nasional atau lokal, agar obyektivitas tetap berada dalam bingkai kondisi, nilai, dan tatanan kehidupan bangsa kita.

Penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan budaya setempat, serta ideal jika dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat. Tradisi dan kearifan lokal itu, berpotensi mendorong keinginan hidup rukun dan damai, karena mengajarkan perdamaian dengan sesama, lingkungan, dan Tuhan.

Oleh karena kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral, maka pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat yang berkonflik, sehingga dapat diharapkan tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi di masyarakat.

Konflik Laten: Rasisme

Ras yang semula menurut konsep Darwinisme ditandai dengan atribut-atribut fisik dan biologis, yang paling jelas atas dasar pigmentasi warna kulit, kemudian terbentuk oleh konstruksi sosial dan pertarungan

kekuasaan. Demikian pula, etnisitas yang semula berkaitan dengan identifikasi diri dan asal-usul sosial, juga terkonstruksi secara historis, kultural dan politis oleh kekuasaan. Atribut- atribut ini lalu dikaitkan dengan intelegensi dan kemampuan dengan pemeringkatan ras-ras yang dianggap superior. Akar rasisme adalah klasifikasi rasial yang dibangun dan dipertahankan melalui kekuasaan.

Di Indonesia formasi historis ras adalah pentas kekuasaan dan subordinasi. Dalam hubungan kesempatan hidup, orang Papua misalnya, secara struktural posisinya ter subordinasikan. Dalam konteks ini, formasi ras atau rasialisasi secara inheren bersifat rasis, yang meliputi bentuk-bentuk sosial, ekonomi, dan subordinasi politik. Sebaliknya, karena keberhasilan ekonomi, China Peranakan secara historis dijadikan subyek kecemburuan sosial, dan distereotipkan dengan berbagai kelicikan, bahkan dijadikan warga negara kelas dua.

Konsep etnisitas bersifat relasional yang berkaitan dengan identifikasi diri dan asal-usul sosial. Ia merupakan sinyal keterpinggiran, yang dalam konteks hubungan pusat dengan pinggiran terbentuk dalam representasi politik⁴.

Faktor rasisme ini menyimpan potensi sebagai pemicu konflik laten, yang siap meletup jika tidak dikelola secara cerdas dan bijak.

Organisasi Mediator Cerdas-Sosial

Definisi teoritis kecerdasan sosial (*social intelligence*) yang dikemukakan oleh para sosiolog cukup banyak dan beragam. Dengan merangkumnya, kecerdasan sosial dapat diartikan sebagai kemampuan yang mencapai kematangan pada kesadaran berpikir dan bertindak untuk menjalankan peran manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalin hubungan dengan lingkungan atau kelompok masyarakat. Kecerdasan sosial ini juga mencakup kemampuan bemegoisasi, mengatasi konflik, dan situasi yang timbul dalam proses negoisasi.

Secara teoritis terdapat lima elemen kunci kecerdasan sosial, yaitu: kesadaran situasional (*situational awareness*); kemampuan membawa diri (*presense*); otensitas (*authenticity*) sehingga layak dipercaya (*trusted*) karena jujur, terbuka, dan tulus; kejelasan (*clarity*) kemampuan persuasi dalam berkomunikasi; dan empati (*empathy*) terhadap gagasan dan penderitaan orang lain. Pendekatan dengan menggunakan kearifan lokal untuk resolusi konflik sudah mencakup kesadaran situasional, kemampuan membawa diri, dan empati.

Menurut data Institut Titian Perdamaian (*Peace Building Institutes*)⁵, fenomena intensitas kekerasan, berturut-turut berupa penghakiman massa, tawuran, konflik politik, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya alam, pengeroyokan, dan konflik etnis/agama yang tercatat, baru merupakan realitas permukaan. Sehingga memerlukan telaah antisipatif yang mendalam dan terorganisir dengan baik.

Upaya pengorganisasian gerakan perdamaian harus mempertimbangkan dua aspek penting dan krusial. *Pertama*, kapasitas untuk menangani konflik yang meliputi keterampilan dan pengetahuan yang adekuat untuk penyelesaian sekaligus pencegahan konflik. *Kedua*, kesadaran kritis masyarakat maupun pemerintah untuk penyelesaian maupun pencegahan konflik.

Kedua aspek ini, baik secara teoritik maupun empirik, merupakan syarat mutlak untuk pencegahan dan penyelesaian konflik. Sehingga kunci suksesnya terletak pada bagaimana kemampuan organisasi sebagai mediator dalam mengembangkan kecerdasan organisasi⁶, yang terdiri atas:

- Organisasi cerdas-pikir, organisasi yang mampu bereaksi dan bertindak cepat-cepat, berkat kemampuan berpikir di level kebijakan, strategi dan operasional;
- Organisasi cerdas-emosi, organisasi berdaya ikat kuat, bersuasana kerja hangat, peduli sesama dan lingkungan, yang diliputi suasana *mutual trust* dan transparansi. Untuk ini, diperlukan sistem dan praktik interaksi *sharing, feedback, challenge* dalam tingkat organisasi, tim dan anggota;
- Organisasi cerdas-makna, organisasi yang kreatif, optimis dan berdaya tahan tinggi. Ini terjadi jika adanya visi yang menantang dan berdaya pikat;
- Organisasi cerdas-sosial, organisasi yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial dimana mereka beroperasi, sehingga mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat setempat.

Dengan kapasitas yang dimiliki organisasi mediator seperti itu, dimana pengembangan potensi menjadi kapabilitas, dan mengolah kapabilitas menjadi kontribusi, berlangsung terus-menerus dan meningkat gradasinya, akan tercipta iklim yang *cerah-nalar* dan *peka-batin*, sehingga organisasi bisa memetik *buah-pikir* konstruktif yang *melandasi aksi* dalam mengelola konflik di lapangan.

Penghayatan dan pengamalannya akan membentuk kualitas sebuah organisasi yang memiliki elemen-elemen kecerdasan secara lengkap, yaitu kecerdasan intelektual (IQ), emosional (EQ), dan spiritual (SQ) secara utuh dan seimbang, sehingga tercipta kecerdasan sosial dalam mengelola konflik menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Resolusi Konflik

Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan golongan. Solidaritas nasional berhasil mengikat kemajemukan itu dalam bangunan berbentuk NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konstitusi memberi tanggung jawab kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara hukum, semua kelompok-apa pun latar belakangnya-memiliki hak dan kewajiban sarna sebagai warga negara.

Dasar, bentuk, konstitusi, dan jargon negara Indonesia jelas mengakui dan menghargai kemajemukan sebagai kekayaan bangsa. Namun, konsep ideal itu sulit diwujudkan. Misalnya tahun 2012 yang lalu diwarnai sejumlah gesekan sosial berlatar perbedaan suku, budaya, agama, dan golongan, memberi gambaran tentang sifat Manusia Indonesia yang sarat amuk massa. Kita terkaget-kaget karena rangkaian peristiwa-peristiwa itu menyuguhkan kekerasan, meluas, dan merenggut nyawa warga.

Bangsa yang majemuk selalu ada kemungkinan retakan sosial yang memunculkan gesekan. Masalah muncul ketika kita gagal mengelola gesekan itu untuk mencegah kekerasan sekaligus menghasilkan kesepakatan bersama. Pengalaman Indonesia, umumnya konflik adalah hasil irisan dari berbagai soal: politik, ekonomi, hukum, etnis, dan budaya. Setiap konflik memiliki karakter lokal tersendiri yang khas. Dari sisi politik, penyelenggara pemerintahan seringkali kurang tanggap atas gejala gesekan sosial sejak dini. Sehingga, ketika konflik meletus, penanganannya selalu terlambat. Dalam beberapa kasus pemilihan umum kepala daerah, retakan sosial tersebut justru dimanfaatkan untuk keuntungan politik tertentu.

Kesenjangan ekonomi dengan pasar dikuasai pemodal yang hanya berorientasi keuntungan, sehingga menciptakan perasaan tidak adil bagi masyarakat yang terpinggirkan. Perasaan tersebut kian mengeras ketika hukum tidak adil, bahkan terkesan memihak kaum pemodal dan elite penguasa. Kondisi tersebut diperuncing oleh menguatnya kantong-kantong primordial berdasarkan etnis, suku, atau ekonomi.

Ketika semua arsip masalah tersebut bertemu, hal-hal kecil saja sudah cukup menyulut warga untuk marah dan bertikai. Dari hanya melibatkan beberapa orang, gesekan gampang melebar menjadi kerusuhan massal. Saat pranata sosial tidak mampu mengatasinya, meletuplah konflik lebih besar. Untuk itu, kita mesti kembali merujuk dasar dan pilar-pilar utama kesepakatan para pendiri bangsa: Pancasila, DUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Semangat ini hendaknya diterjemahkan oleh setiap komponen bangsa sesuai dengan peran masing-masing.

Pemerintah dituntut untuk melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Tegakkan keadilan dalam hukum, ekonomi, dan sosial. Hukum harus dijalankan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Kembangkan ekonomi secara merata sehingga semua kelompok masyarakat menikmati pembangunan. Perkuat tatanan sosial yang membaurkan semua kelompok secara sederajat. Cegah munculnya kelompok-kelompok yang hidup secara eksklusif.

Kita juga perlu menghidupkan organ-organ sosial, seperti masyarakat adat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau media. Semua itu dapat diberdayakan untuk mengelola konflik agar menemukan jalan keluarnya⁷.

Dialog Budaya, dari Yogyakarta untuk Maluku

Dalam upaya ikut membantu menjembatani konflik kemanusiaan di Maluku, Yogyakarta pernah menjadi pilihan tempat untuk “Workshop Rekonsiliasi Tahun 2000”, dan Dialog Budaya Maluku “Satu Bangsa Dua Komunitas Tahun 2004”. Dalam kedua momentum itu saya diminta menyampaikan kontribusi gagasan dari tinjauan aspek kultural. Tiga Tiang Baku sebagai terapi dan solusi dasar perdamaian berhasil ditegakkan di Yogyakarta pada tahun 2004 itu, yang terdiri atas:

- 1) Revitalisasi Lembaga Adat;
- 2) Muatan lokal dalam proses belajar-mengajar, dan
- 3) Aktualisasi nilai-nilai adat, tradisi dan budaya lokal dengan “ruh” baru agar mampu menjawab pesatnya perubahan zaman.

Selanjutnya saya juga diundang untuk memberikan Orasi Budaya di Ambon dalam forum Musyawarah LatupatiIRaja untuk “Menata Masa Depan Maluku Tahun 2003” yang digelar oleh Gerakan Baku Bae Maluku dan Universitas Pattimura Ambon. Kemudian disusul “Musyawarah Besar Majelis Latupati Maluku Tahun 2007” untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ikut menata kembali jatidiri

masyarakat berbasis adat kepulauan Maluku dalam bingkai integritas Nusantara.

Saya bersyukur, setelah tifa dipukul yang menandai dimulainya Gerakan Baku Bae Maluku yang terbuka kepada publik pasca Musyawarah Besar 2007 itu, secara berangsur Maluku memasuki masa pemulihan pasca konflik kemanusiaan. Kepercayaan masyarakat mulai terbangun dan tumbuh optimisme terhadap masa depan. Saat itulah momentum yang tepat untuk membangun kembali Maluku bersama seluruh rakyat Maluku, tanpa kecuali. Diharapkan, dengan pendekatan yang bersumber dari hati nurani Majelis Latupati bisa ikut menjembatani komunikasi kelompok yang bertikai dengan menciptakan kegiatan-kegiatan rekonsiliasi bersama di seluruh wilayah Maluku.

Langkah awal, diusahakan agar masyarakat melakukan penyembuhan diri, dengan bangunan-bangunan mediasi dan komunikasi yang diciptakan oleh dan tumbuh serta ditumbuhkan dari *grass-root level* masyarakat sendiri.

K̄asus P̄oso

Di Poso akar masalahnya karena tidak dipahaminya makna kearifan lokal *Sintuwu Maroso* oleh para migran, yang maknanya adalah “persatuan dan kerjasama yang kokoh dalam rambu saling menghormati dan menghargai”.

Semboyan itu mencerminkan keterbukaan, keramahan, bahu-membahu dan tolong-menolong yang ditunjukkan dengan sikap toleransi kepada orang yang berbeda suku dan agama⁸.

Dalam perspektif kemajemukan, Poso terbentuk menjadi model masyarakat yang plural, multi suku dan bermacam agama, tetapi tidak terintegrasi satu dengan yang lain. Hal ini akibat adanya segregasi wilayah berdasar agama dan suku. Di Kecamatan Poso Kota misalnya, nama kampung sama dengan nama suku yang dominan. Ada Kampung Jawa, Gorontalo, Bugis, Arab, Minahasa dan berbagai *term* yang menunjukkan entitas etnis secara ekstrim, yang kemudian diperkuat oleh entitas keber-agama-an masyarakatnya. Kampung Bugis, Gorontalo, dan Arab, penduduknya dominan beragama Islam, sementara Kampung Minahasa dan semacamnya beragama Kristen.

Masyarakat multi etnis terpetakan dalam spektrum perbedaan ajaran agama yang dogmatis daripada persamaan dalam mengaktualisasikan kesalehan sosial di tengah masyarakat luas. Dalam perkembangan selanjutnya, diwarnai oleh semangat perbedaan dengan

nuansa politik, sementara semangat kultural yang merepresentasikan sikap toleransi dan pemahaman bersama semakin pudar. Interaksi mereka mengalami siklus yang stagnan dan kontra produktif untuk membangun semangat kebersamaan dalam keragaman. Masyarakat kehilangan momentum penting dalam menata pergaulan antarbudaya. Institusi yang dapat dipakai oleh masyarakat sebagai tempat pertemuan hanya kantor, sekolah, pesta dan pasar, dimana pasar memiliki peran yang dominan.

Namun pasar bukanlah wilayah yang kondusif bagi terjadinya akulturasi budaya, karena sifatnya eksploitatif, apalagi didominasi oleh pendatang. Masyarakat asli “terperangkap” oleh pola yang berbasis pertanian dan birokrasi pemerintahan. Sedangkan kaum migran berhasil menjadikan institusi pasar *entry point* ke penguasaan sektor pertanian dan birokrasi. Sementara orang asli Poso masih berusaha *survival* di dua sektor tersebut.

Awalnya dalam struktur sosial dikenal istilah *waangkabosenya* yang terbagi atas dua kelas. *Kabosenya* adalah kelas masyarakat atas (borjuasi atau pemilik modal), dan *watua* merepresentasikan kelas bawah (proletariat buruh tani). *Kabosenya* meski sebagai kelas borjuasi, mereka juga memposisikan diri sebagai pelindung bagi *watua* yang bekerja pada *kabosenya*. Ekspansi oleh kaum migran, juga berdampak pada pola pergeseran tatanan nilai budaya *waangkabosenya*, bukan pada kelasnya, tetapi eksistensi kelas tersebut.

Penguasaan alat-alat produksi, seperti tanah, menempatkan kaum migran sebagai kelas *kabosenya* baru. Sementara sebagian *kabosenya* lama, terutama generasi selanjutnya, berubah menjadi *watua*. Pergeseran terjadi di wilayah substansi kelas tersebut, sebab yang berlangsung kemudian adalah kelas *kabosenya* tidak lagi bertindak sebagai pelindung bagi kelas *watua*. Hubungan *kabosenya-watua* tidak lagi berarti saling melindungi, tetapi lebih pada watak ekonomi dan seringkali bersifat eksploitatif⁹.

Pergeseran kelas sosial itulah, menurut hemat saya, yang menjadi inti permasalahan yang memicu konflik Poso.

Kasus Papua

50 tahun lalu Papua lepas dari kekuasaan Belanda, kemudian dalam proses cukup lama yang berakhir dengan suatu “jajak pendapat” masuk ke dalam Republik Indonesia. Akan tetapi sampai sekarang Papua tetap tidak tenang. Sampai hari ini kontroversi ibarat seperti api

dalam sekam, apakah jajak pendapat itu betul-betul sebuah *act of free choice* atau sebenarnya sebuah *act free of choice*. Rakyat Papua berkesan semakin kehilangan harapan akan suatu masa depan secara manusiawi dan terhormat dalam pangkuan NKRI.

Tidak mengherankan bahwa dalam situasi ini pelbagai pihak justru mengambil sikap yang keras, tanpa kompromi, dengan kesediaan untuk mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang sangat kompleks itu dengan kekerasan. Padahal kekerasan bukan jalan keluar. Kalau suatu bagian rakyat hanya dapat dipertahankan dalam kesatuan negara dengan cara kekerasan dan penindasan, maka negara itu sebenarnya sudah kehilangan mereka. Situasi di Papua sekarang mendekati keadaan seperti itu.

Dalam situasi itu buku Rama Dr. Neles Tebay, *Angkat Pena Demi Dialog Papua*, yang merupakan kumpulan 54 Artikel Opini tentang Dialog Jakarta- Papua Tahun 2001-2011, bagaikan embun yang menyejukkan. Tahun 1992 ketika ditahbiskan sebagai imam dalam Gereja Katolik, ia diberi nama adat "*Kebadabi*" yang dalam bahasa *Mee* berarti "*orang yang membuka pintu atau jalan*". Buku ini membuktikan Neles Tebay sebagai pembuka pintu dan penunjuk jalan. Ia menunjukkan bahwa Papua yang damai, maju dan gembira, itu pun dalam kesatuan dengan Indonesia, masih mungkin. Sejak 13 tahun lalu, ia secara konsisten menyuarakan moderasi, sikap tahu diri dan sekaligus secara konsisten menuntut agar rakyat Papua memperoleh haknya.

Suara Neles Tebay adalah suara perdamaian, ia menolak kekerasan "entah apa pun motivasi dan tujuannya". Yang menjadi tujuannya adalah memajukan dialog Jakarta-Papua. Malu kita membaea bahwa selama sepuluh tahun pemerintah pusat dan aparatnya meneurigai kata "dialog" hanya karena kata ini menjadi kata kunei dalam Kongres Papua II di tahun 2000. Baru setelah Presiden memberikan komitmen Jakarta terhadap dialog dengan Papua, kata dialog berbalik menjadi mantra sakti. *Political will* sudah ada, kini yang ditunggu tinggal *political action* Presiden, antara lain desekuritisasi adalah kata kunei menuju Papua yang damai.

Karena itu buku ini penting, kalau dieari pemeeahan positif-damai "*masalah Papua*". Judul-judul seperti "*menyelesaikan korflik Papua*", "*mengubah Papua menjadi tanah damai*" atau "*mempersiapkan dialog*" memperlihatkan betapa kosakata DIALOG seialu menjadi tema sentral buku ini. Neles Tebay menunjukkan

bahwa masih ada masa depan yang positif bagi Papua dalam persatuan dengan Indonesia¹⁰,

Dialog bukan solusi, melainkan media atau forum yang disediakan untuk memulai kebuntuan komunikasi politik antara Jakarta dan Papua. Komunikasi yang lebih intens dan reguler menjadi penting dalam rangka mengatasi ketegangan, saling curiga, dan saling tidak percaya antara Jakarta dan Papua selama ini. Dialog damai bukan sesuatu yang instan, melainkan proses panjang yang harus dipersiapkan secara matang. Meskipun rumit, dialog sangat mungkin dilakukan dengan terlebih dulu menciptakan kondisi-kondisi yang membuat para pihak semakin yakin untuk berdialog.

Proses komunikasi dialogal merupakan satu-satunya cara untuk keluar dari jalan buntu di mana kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang dipakai, bahasa kedua pihak yang sama-sama menuliskan diri yang hanya akan berakhir di jalan buntu.

Catatan Akhir

Selama ini budaya cenderung diposisikan sekedar latar wacana dan praktik kenegaraan dan kemasyarakatan. Kurang terartikulasinya budaya itu, karena memahami budaya secara sempit sebagai benda peninggalan dan mentalitas yang dikaitkan dengan kelampauan. Sesungguhnya budaya memiliki sifat kekinian dan aktif dalam proses penataan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, yang selama ini ditanggapi secara sektoral¹¹.

Ketika kita jenuh menjalani hidup, jalan yang bijak adalah menyelam ke danau kebudayaan. Di sana airnya jernih, sejernih Sang Kudus, sebiru nirmala Yang Maha Pencipta. Dengan metafora Jernihnya “air kebudayaan” itu, pendekatan cultural seharusnya menjadi aras utama upaya resolusi konflik sosial, agar tidak meluas menjadi kekerasan kolektif tanpa hati.

Pendekatan kultural pada hakikatnya adalah mediasi kemanusiaan yang bersumber dari hati nurani guna tercapainya perdamaian yang berkelanjutan. Namun, membutuhkan kesabaran dan konsistensi, serta perlu dukungan energi dari berbagai gerakan perdamaian. Energi yang terpisah-pisah perlu diikat serta dipersatukan dan menjadikannya sinergi untuk resolusi konflik lewat pembangunan perdamaian berbasis masyarakat.

Setiap resolusi konflik diawali dengan membangun saling pengertian (*mutual understanding*) terlebih dulu sebagai basis untuk menciptakan rasa saling percaya (*mutual trust*), untuk selanjutnya agar tumbuh rasa saling menghormati (*mutual respect*) di antara para pihak yang terlibat konflik,

Kesemuanya itu harus berangkat dari sebuah dialog yang tulus, jujur dan terbuka. Dan peran itu hanya bisa dilakukan jika organisasi atau seorang aktor yang bertindak sebagai mediator, memiliki kapasitas kecerdasan sosial dalam mengelola konflik. Sebab kalau tidak ada dialog, apakah kita akan menjadikan “wicirna-sahana” sebagai pilihan resolusi konflik

Palembang, 24 April 2013

DR. (HC). SRI SULTAN HAMENGGU BUWONO X

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PASCA SENGKETA TANAH PERTANIAN DI DESA RENGAS KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR

Muhammad Yazid, Chi-Chi Novitasari, Yulian Junaidi
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
Sriwijaya
Jalan Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Email: yazid_ppmal@yahoo.com

Abstract

This research aimed at observing social changes took place after the resolution of land conflict in Rengas Village, Payaraman District, Ogan Ilir Regency. Land conflict between the people of Rengas Village and PTPN VII Cinta Manis happened for 27 years since 1982. After resolution, land conflict had brought several social organizational changes into the social system such as social interaction, social institution, and social stratification. Social interaction became more intensive, social institution increased in number with the establishment of new institutions after land conflict, and social stratification showed more equity. Whereas, economic changes could be observed from the shift from farm worker to farm owner, increase in welfare, and improvement in child education. Ownership of tertiary goods such as motor vehicle was also the consequence of this resolution.

Keywords: land conflict, resolution, social interaction, institution, stratification, welfare.

Pendahuluan

Sengketa tanah di Provinsi Sumatera Selatan bukanlah hal baru. Pada periode tahun 2009 hingga 2011 saja tercatat 48 kasus sengketa yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Dari 48 kasus tersebut, terdapat 2 kasus sengketa di Kabupaten Empat Lawang, 1 kasus di Kota Pagaralam, 3 kasus di Kabupaten Lahat, 5 kasus di Kabupaten Musi Rawas, 8 kasus di Kabupaten Musi Banyuasin, 12 kasus di Kabupaten Banyuasin, 3 kasus di Kabupaten OKU, 6 kasus di Kabupaten OKI, dan 6 kasus di Kabupaten Ogan Ilir (WALHI, 2011).

Kasus sengketa tanah yang cukup besar dan menarik perhatian berbagai kalangan adalah kasus yang terjadi di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. Sengketa terjadi antara pihak PTPN VII Cinta Manis dengan masyarakat Desa Rengas. Menurut Kholek

(2011), kasus ini bermula sejak masuknya PTPN VII Cinta Manis pada tahun 1982. Tanah seluas 20.000 ha yang dicadangkan untuk PTPN VII berdasarkan SK Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan No. 379/I/1981 tanggal 16 November 1981 ternyata mencakup tanah ulayat Desa Rengas. Tanah ulayat Desa Rengas yang diusahakan PTPN VII seluas 2.353 ha. Namun yang diganti rugi oleh PTPN VII Cinta Manis hanya 824 ha, sedangkan sisanya seluas 1.529 ha tidak diganti rugi. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu konflik yang terjadi selama lebih dari 27 tahun.

Terjadinya sengketa lahan di Desa Rengas tidak terlepas dari peran para pihak, yaitu pemerintah, perusahaan dan petani sendiri (Novitasari, Yazid dan Junaidi, 2013). Pemerintah dari tiga tingkatan birokrasi berkontribusi terhadap peristiwa ini. Pemerintah Pusat melalui kementerian menerbitkan SK Mentan No. 076/Mentan/I/1981 yang menjadi dasar berdirinya PTPN VII Cinta Manis. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti SK ini dengan menerbitkan izin operasi melalui SK Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan No. 379/I/1981 tanggal 16 November 1981 dan Surat Tugas Bupati KDH Tingkat II OKI No: AG.210-243/1982 tanggal 10 April 1982 untuk mengadakan inventarisasi tanah, tanam tumbuh, dan bangunan rakyat terhadap lokasi yang akan dibebaskan oleh PTPN VII. Berdasarkan ketiga SK yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten inilah kemudian PTPN VII Cinta Manis mengoperasikan lahan puluhan ribu hektar di Kabupaten Ogan Ilir.

PTPN VII Cinta Manis merupakan aktor kedua dalam konflik yang terjadi karena PTPN VII Cinta Manis adalah pengembang usaha pabrik gula dan perkebunan tebu di Kabupaten Ogan Ilir. PTPN VII dianggap masyarakat desa Rengas sebagai perampas tanah ulayat yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka. PTPN VII melakukan proses ganti rugi secara sepihak tanpa kesepakatan dengan masyarakat. Ketidaksepakatan inilah yang kemudian menjadi pemicu sengketa.

Petani Desa Rengas merupakan pelaku sekaligus korban dalam konflik pertanahan ini. Tanah yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat diganti rugi secara tidak sesuai disertai tindakan intimidasi yang tidak manusiawi menjadi alasan kuat bagi petani untuk melakukan perlawanan.

Sengketa tanah dan perlawanan petani desa Rengas dapat dibagi dalam empat fase (Novitasari, Yazid dan Junaidi, 2013). Fase pertama terjadi sepanjang tahun 1982-1990, ditandai dengan perlawanan petani Rengas terhadap PTPN VII Cinta Manis yang mengelola tanah mereka untuk

lijadikan perkebunan tebu. Perlawanan yang dilakukan oleh petani di masa ini hanya dalam bentuk protes secara personal. Masing-masing petani yang tanahnya diambil melakukan penolakan terhadap ganti rugi yang diberikan dan terus mempertahankan tanah yang diambil paksa oleh pihak PTPN VII Cinta Manis. Dalam fase ini terdapat gerakan intimidasi yang dilakukan PTPN VII yang melibatkan aparat keamanan negara. Gerakan petani yang dilakukan secara personal ini sempat terhenti sepanjang 1986-1990 karena banyak aktor penting yang melakukan perlawanan secara terang-terangan meninggal dunia dan tidak ada hasil yang didapatkan petani, sementara PTPN VII tetap menjalankan kegiatannya dan pemerintah bersikap seolah-olah tidak mengetahui tentang peristiwa yang terjadi.

Fase kedua terjadi sepanjang tahun 1991-2000 yang melibatkan lebih banyak petani yang melakukan perlawanan secara terang-terangan, berkelompok dan lebih terorganisir. Aksi-aksi seperti menutup dan memutuskan jalan akses kendaraan pengangkut tebu ke pabrik gula Cinta Manis dilakukan bersamaan dengan upaya hukum untuk menuntut pengembalian tanah mereka. Hasilnya, Pengadilan Negeri mengabulkan tuntutan masyarakat, tetapi PTPN VII menolaknya. PTPN lalu mengajukan permasalahan ke Pengadilan Tinggi, tetapi keputusan tetap memenangkan gugatan masyarakat Desa Rengas. Pihak PTPN tetap tidak bersedia memenuhi gugatan masyarakat hingga akhirnya kasus diajukan ke Mahkamah Agung yang akhirnya juga memenangkan gugatan masyarakat. Akan tetapi PTPN lagi-lagi tidak memenuhi keputusan untuk mengganti rugi atau mengembalikan tanah masyarakat. Upaya lainnya seperti pembentukan *enclave* dan pemberian kompensasi tetap tidak diindahkan pihak perusahaan.

Fase ketiga terjadi sepanjang tahun 2001-2009 setelah hampir 20 tahun tanah ulayat milik petani dijadikan perkebunan tebu dan selama itu pula petani terpaksa mencari pekerjaan lain menjadi buruh tani di daerah lain. Berbagai perkembangan yang terjadi pada periode ini seperti adanya putusan MA, teguran pemerintah, dukungan mahasiswa dan pegiat organisasi masyarakat tidak dapat menggoyahkan sikap arogan PTPN VII Cinta Manis. Akhirnya masyarakat merasa bahwa tidak ada yang dapat membuat tanah itu kembali kecuali dengan mengerahkan kekuatan massa yang menandai fase perlawanan secara frontal, yaitu *reclaiming* lahan. Pada bulan Juni 2009 masyarakat mulai memasang patok batas antara lahan PTPN VII dengan tanah ulayat dan mendirikan pondok penjagaan. Pada bulan September 2009 terjadi penyanderaan terhadap dua warga Desa Rengas oleh aparat negara dan satgas PTPN VII karena menyaksikan dan melarang aparat dan satgas membongkar

patok dan membakar pondokan yang dibuat oleh masyarakat Rengas. Peristiwa inilah yang kemudian memicu tragedi berdarah yang terjadi pada 4 Desember 2009.

Fase keempat adalah kejadian pasca puncak konflik Desember 2009 yang merupakan kejadian paling bersejarah bagi masyarakat Desa Rengas. Pada 4 Desember 2009, terjadi konflik terbuka berujung penembakan warga oleh Satgas PTPN VII Cinta Manis dan Brimob Polda Sumatera Selatan yang mengorbankan puluhan jiwa, 12 diantaranya dilarikan ke rumah sakit. Masyarakat melakukan aksi balasan dengan membakar semua fasilitas yang saat itu berada di tempat kejadian seperti kantor, alat-alat berat, perumahan dan kendaraan bermotor. Setelah peristiwa ini tanah sengketa yang selama 27 tahun diperebutkan kembali menjadi milik masyarakat. Masyarakat kemudian melakukan pengukuran dan pembagian untuk masing-masing kepala keluarga dengan sistem undian/arisan. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan 1 ha tanah. Sebagian lahan sengketa juga diberikan untuk kelompok-kelompok dan organisasi yang kemudian mereka sebut sebagai tanah kolektif.

Tanah sengketa yang disebut masyarakat Desa Rengas sebagai tanah perjuangan digunakan petani untuk menanam tanaman seperti tanaman hortikultura (semangka, nanas, kacang panjang), palawija (kacang-kacangan dan umbi-umbian), hingga budidaya burung walet. Akan tetapi saat ini hampir seluruh lahan yang mereka dapatkan tersebut ditanami karet yang diselingi oleh tanaman padi atau nanas secara bergantian.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah dampak kembalinya lahan sengketa terhadap kondisi sosial ekonomi petani di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. Secara khusus, penelitian ini mengkaji perubahan interaksi, institusi dan stratifikasi sosial masyarakat setelah kembalinya lahan sengketa.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan rangkaian dari studi untuk mengkaji proses dan penyebab terjadinya sengketa lahan di lokasi studi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian secara lengkap dan terinci. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Juni 2012. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan yang dipilih dengan teknik *snowball sampling*. Wawancara dipandu dengan

pedoman wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*). Selain itu, data pendukung penelitian juga dikumpulkan dengan mempelajari dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan konflik lahan di lokasi studi. Dalam penelitian ini juga dilakukan observasi langsung keadaan di lapangan dan mencatat semua peristiwa dan situasi yang tergambar di lapangan.

Untuk memperoleh data yang memiliki validitas yang tinggi maka dilakukan tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan untuk meningkatkan validitas dengan mencari data dari sumber yang beragam dan terkait satu sama lain untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber. Triangulasi teknik dilakukan menggunakan beragam teknik pengungkapan data untuk mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Artinya, selain melakukan wawancara mendalam terhadap sumber peneliti juga melakukan observasi terhadap sumber yang diwawancarai dan melakukan dokumentasi terhadap data yang diperoleh. Triangulasi waktu dilakukan untuk mengumpulkan data dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda dengan tujuan untuk mengecek konsistensi, kedalaman, dan kebenaran suatu data.

Hasil dan Pembahasan

Perubahan Sosial Petani di Desa Rengas

Perubahan Interaksi Sosial

Akibat dari sengketa tanah, banyak masyarakat yang kemudian meninggalkan desa dan merantau untuk menjadi buruh di daerah lain. Dampak dari hal ini adalah berkurangnya interaksi sosial baik dalam keluarga maupun antar warga. Pasca resolusi konflik lahan dan kembalinya lahan kepada masyarakat, interaksi sosial yang berkurang kemudian kembali meningkat (Tabel 1).

Tabel 1. Perubahan interaksi sosial masyarakat ketika konflik berlangsung dan pasca resolusi konflik

No.	Interaksi Sosial	Ketika konflik berlangsung	Pasca resolusi konflik
1.	Intensitas komunikasi dalam keluarga	Komunikasi dalam keluarga kurang terbangun akibat minimnya pertemuan dan kebersamaan.	Komunikasi dalam keluarga menjadi lebih baik karena petani sudah menetap di desa dan sering berada di rumah.
2.	Intensitas komunikasi dalam masyarakat	Komunikasi dengan masyarakat juga kurang terbangun karena masyarakat jarang berada di desa. Masyarakat terkadang meninggalkan desa hingga berbulan-bulan dan hal tersebut terjadi selama bertahun-tahun.	Komunikasi dengan masyarakat juga menjadi lebih baik. Meskipun pada pagi hingga siang bahkan sore hari masyarakat masih berada di kebun tetapi interaksi dapat dilakukan pada malam hari.

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa intensitas komunikasi yang terjadi pasca resolusi konflik baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat meningkat. Hal ini dikarenakan waktu yang dimiliki oleh petani di desa dan di rumah jauh lebih banyak dibandingkan saat mereka kehilangan tanah yang mengharuskan mereka meninggalkan desa selama berbulan-bulan untuk bekerja sebagai buruh tani di daerah lain.

Lembaga Sosial

Intensitas komunikasi dan interaksi sosial yang terjadi antar masyarakat Desa Rengas berpengaruh pada pembentukan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Minimnya interaksi sosial ketika konflik berlangsung telah mempersempit kesempatan masyarakat untuk membentuk lembaga sosial baik formal maupun informal. Adapun lembaga-lembaga sosial yang pernah terbentuk baik ketika berlangsungnya konflik maupun setelah lahan kembali kepada masyarakat pasca resolusi konflik disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Keberadaan lembaga sosial masyarakat ketika konflik berlangsung dan pasca resolusi konflik

No.	Lembaga Sosial	Ketika konflik berlangsung	Pasca resolusi konflik
1.	Kelompok Arisan dan Pengajian	√	√
2.	Karang Taruna	√	√
3.	Front Pemuda Rengas (FPR)	-	√
4.	Serikat Petani Indonesia (SPI)	-	√

Selama berlangsungnya konflik hanya ada dua lembaga sosial di Desa Rengas, yaitu arisan dan karang taruna. Setelah resolusi konflik, selain kedua lembaga sosial tersebut tumbuh pula dua lembaga sosial lainnya yaitu Front Pemuda Rengas (FPR) dan Serikat Petani Indonesia (SPI). Arisan adalah lembaga sosial yang telah lama ada dalam masyarakat Desa Rengas. Namun, sebelum dan selama berlangsungnya konflik kegiatan arisan ini hanya diikuti oleh beberapa ibu saja. Setelah resolusi konflik dan lahan kembali kepada masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang menetap di desa dan kelompok arisan semakin bertambah hingga saat studi ini berjumlah 25 kelompok. Kegiatan arisan pun saat ini dilakukan bersamaan dengan pengajian, yang berarti telah terjadi peningkatan intensitas kegiatan.

Karang taruna terbentuk sebelum kembalinya tanah sengketa kepada masyarakat. Namun, kegiatannya lebih kepada kepentingan desa dan tidak terkait atau terlibat dalam masalah pertanahan. Kegiatan kepemudaan meningkat dengan munculnya Front Pemuda Rengas (FPR) yang merupakan organisasi nonformal yang terbentuk pada akhir tahun 2009 setelah kejadian penembakan terhadap puluhan warga Rengas. Organisasi ini dibentuk berdasarkan usulan dan saran dari pihak pendamping yang saat itu membantu masyarakat untuk berjuang dan mengambil kembali tanah mereka. FPR bertugas untuk menyiapkan segala keperluan masyarakat dalam melakukan aksi-aksi (demonstrasi), mediasi, dan konsultasi seperti membuat surat, atribut dan spanduk.

Masyarakat Desa Rengas bergabung dalam organisasi Serikat Petani Indonesia (SPI) setelah tragedi 4 Desember 2009. Tujuan dari SPI dalam pendampingan kepada masyarakat Desa Rengas adalah untuk membentuk dan merapikan organisasi, memberikan pendidikan tentang litigasi maupun non-litigasi, dan menciptakan masyarakat yang mandiri.

Stratifikasi Sosial

Perubahan stratifikasi sosial yang terjadi di Desa Rengas ketika berlangsungnya konflik dan pasca resolusi konflik dan lahan kembali kepada masyarakat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perubahan stratifikasi sosial ketika berlangsungnya konflik dan pasca resolusi konflik

No.	Stratifikasi sosial	Ketika konflik berlangsung	Pasca resolusi konflik
1.	Kekayaan	Berdasarkan luas tanah yang dimiliki selain tanah yang dikuasai PTPN VII Cinta Manis.	Strata berdasarkan luas pemilikan mulai memudar seiring meningkatnya taraf kehidupan petani. Perbedaannya dilihat dari kondisi rumah dan jumlah kendaraan.
2.	Kekuasaan	Tidak terlihat karena jabatan sebagai aparat desa hanya dianggap sebagai bagian dari kondisi struktural saja.	Tidak berubah, jabatan sebagai aparat desa tetap dianggap sebagai bagian dari kondisi struktural saja.
3.	Pendidikan	Terlihat karena masyarakat yang bersekolah tinggi dianggap memiliki pengetahuan yang tinggi. Pada saat itu hanya terdapat segelintir orang saja yang mengenyam bangku pendidikan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi.	Tidak terlihat karena saat ini sudah banyak masyarakat yang berstatus sebagai mahasiswa dan menyanggah gelar sarjana.

membangun atau memperbaiki rumah. Masyarakat banyak yang mengubah rumah mereka dari yang semi permanen menjadi rumah permanen. Setiap rumah memiliki kendaraan bermotor mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, dan mobil angkutan (truk). Setiap keluarga sekurang-kurangnya memiliki dua unit sepeda motor, satu unit sepeda motor untuk keperluan usaha (operasional kebun) dan satu unit untuk keperluan lainnya.

Perubahan ekonomi dari sisi kekayaan yang terjadi pada kehidupan petani Desa Rengas memang tidak sepenuhnya akibat dari kembalinya tanah sengketa kepada mereka. Hal ini dikarenakan tanah yang sekarang disebut masyarakat Desa Rengas sebagai tanah perjuangan itu baru dikelola selama kurang dari tiga tahun terakhir. Saat ini lahan tersebut ditanami karet yang baru berusia dua tahun dan belum menghasilkan. Namun, di sela-sela tanaman karet petani juga menanam padi, palawija, sayuran, nanas dan semangka. Pendapatan dari usahatani padi, palawija dan sayuran digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari nanas dan semangka dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, termasuk menambah aset rumah tangga.

Peningkatan kekayaan petani di Desa Rengas juga berasal dari pendapatan yang mereka terima selama bekerja di luar daerah. Sebagian besar petani mengumpulkan penghasilan mereka untuk membeli tanah sehingga beberapa tahun sebelum tanah sengketa kembali petani telah mempunyai tanah sendiri yang telah ditanami karet dan saat ini sudah menghasilkan. Sebagian petani menggunakan pendapatan yang diperoleh dari bekerja di daerah lain untuk memperbaiki rumah secara bertahap dan saat ini rumah mereka telah selesai diperbaiki. Sedangkan kendaraan seperti sepeda motor diperoleh dari penjualan hasil usahatani seperti nanas dan semangka yang ditanam di tanah sengketa pasca resolusi konflik.

Pendidikan

Saat ini hampir semua penduduk yang berada dalam usia sekolah baik SD, SMP, maupun SMA sedang mengenyam pendidikan di bangku sekolah dan berstatus sebagai pelajar. Bahkan tidak sedikit yang melanjutkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi. Hal ini ditunjang oleh fasilitas sekolah yang terdapat di desa seperti SD dan MI. Pendidikan SMP dan SMA berada di luar desa, tetapi jaraknya tidak jauh dari desa. Jika dibandingkan dengan masa-masa ketika berlangsungnya konflik lahan, saat ini pendidikan masyarakat sudah lebih baik. Ketika petani

kehilangan tanahnya dan beralih profesi sebagai buruh tani hingga ke kabupaten lain, cukup banyak anak-anak petani yang terpaksa putus sekolah. Selain karena kurang mampu membayar biaya pendidikan, anak-anak putus sekolah karena mereka dibawa merantau oleh orang tuanya dan ada juga yang putus sekolah karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa lahan di Desa Rengas disebabkan oleh pelaku-pelaku yang terkait, yaitu pemerintah, PTPN VII, dan petani. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah memberikan izin operasi kepada PTPN VII tanpa memperdulikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat Desa Rengas. Pemerintah juga tidak melakukan pengawasan terhadap proses ganti rugi yang dilakukan oleh PTPN VII. PTPN VII sebagai pengembang usaha yang mengelola tanah petani Rengas tidak memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan. Petani sebagai pengelola tanah ulayat yang telah diwariskan oleh para orang tuanya tidak mau menerima ganti rugi karena nilai ganti rugi tidak sesuai dan tidak berdasarkan kesepakatan.
2. Perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat konflik lahan di Desa Rengas dapat dicermati dari perubahan interaksi sosial, lembaga sosial, dan stratifikasi sosial. Sengketa lahan membuat interaksi dalam masyarakat menjadi terbatas karena banyak petani harus bekerja ke luar desa. Terdapat dua lembaga yang terbentuk setelah kembalinya tanah kepada masyarakat yaitu FPR dan SPI. Sengketa juga membuat perubahan pada stratifikasi sosial masyarakat karena telah terjadi kesenjangan sosial dalam hal kekayaan dan pendidikan. Tetapi kesenjangan tersebut memudar setelah kembalinya lahan sengketa kepada masyarakat. Sedangkan strata berdasarkan kekuasaan tidak terlihat karena masyarakat memandang jabatan sebagai aparat desa adalah bentuk aturan struktural saja.
3. Dampak ekonomi akibat sengketa lahan di Desa Rengas terlihat dari pergeseran tenaga kerja, kekayaan, dan pendidikan. Hilangnya tanah mengalihkan profesi petani menjadi buruh tani, tetapi kemudian kembali menjadi petani setelah tanah yang diperjuangkan selama ini dikuasai kembali. Namun tanah yang kembali bukanlah faktor utama yang menyebabkan adanya peningkatan kekayaan petani yang terlihat

dari perbaikan kondisi rumah dan bertambahnya kepemilikan kendaraan pribadi. Pendidikan masyarakat Desa Rengas membaik setelah tanah sengketa kembali sebab tidak ada lagi anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena dibawa orang tuanya merantau ke daerah lain atau karena tidak adanya biaya serta perhatian dari orang tua.

Referensi

- Berita Musi. 2009. Keterangan PTPN VII Cinta Manis Mengenai Lahan Sengketa [terhubung berkala] <http://www.beritamusi.com> [diakses 12 Juli 2012].
- Kholek, A. 2011. Strategi Advokasi NGO dalam Konflik Pertanahan. Penerbit UGM. Yogyakarta.
- Satori, D dan Komariah, A. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Soekartawi. 2010. Agribisnis: Teori dan Aplikasinya. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- WALHI. 2011. Daftar Kasus Sengketa Tanah di Sumatera Selatan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Sumatera Selatan.